

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GRESIK PADA MASA PEMERINTAHAN BUPATI KH. ROBBACH MA'SUM TAHUN 2000-2010

**MIFTAKUL JANNAH**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
E-mail: [miftakuljannah56@gmail.com](mailto:miftakuljannah56@gmail.com)

**Sumarno**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

### Abstrak

Kabupaten Gresik memprioritaskan bidang pendidikan dalam kebijakan pembangunan. Pendidikan menjadi hal yang penting dalam kehidupan untuk mendapatkan ilmu dalam pembangunan. Kemajuan pembangunan disebabkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan terdidik. Sesuai dengan pasal 31 UUD 45 semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Hal itu didukung oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Persoalan yang dihadapi Kabupaten Gresik sebelum KH. Robbach Ma'sum sudah banyak melakukan pembangunan sarana dan prasarana tetapi jumlah pembangunan pendidikan luar sekolah masih kurang, masih rendahnya sumber daya manusia masyarakat Gresik, alokasi anggaran dana yang kurang untuk menunjang pendidikan, penempatan stakeholder yang kurang tepat untuk pengelolaan pendidikan dan kesejahteraan guru yang kurang mendapatkan perhatian.

Permasalahan penelitian ini yaitu 1. Mengapa pendidikan dijadikan skala prioritas dalam pembangunan kebijakan pada masa Bupati KH. Robbach Ma'sum? 2. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan pada masa Bupati KH. Robbach Ma'sum? 3. Bagaimana dampak dari implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Gresik pada masa Bupati KH. Robbach Ma'sum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi (1) Heuristik, mencari sumber sejarah sesuai topik yang akan diteliti, (2) Kritik, menganalisis sumber untuk mencari fakta sejarah (3) Interpretasi, menganalisis sumber yang sudah dikritik kemudian diinterpretasi sesuai dengan tema penelitian (4) Historiografi, penulisan sumber yang terbentuk rekonstruksi peristiwa sejarah.

Hasil dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan Berbagai persoalan pendidikan di Kabupaten Gresik yang dilakukan KH. Robbach Ma'sum berlatar belakang pendidikan sebagai hal yang penting dalam kehidupan manusia dan bertujuan meningkatkan SDM masyarakat Gresik. KH Robbach Ma'sum sebagai bupati mengalokasikan anggaran dana sebesar 30% dari total APBD Kabupaten Gresik sebesar 480 Milyar untuk menunjang pelaksanaan kebijakan pendidikan. Berhasil mendapatkan penghargaan internasional dari Kerajaan Brunei atas kepedulian bupati dalam pembangunan bidang pendidikan.

KH. Robbach Ma'sum berhasil menuntaskan buta aksara pada tingkat dasar tahun 2004 dan tingkat lanjut tahun 2009 melalui program percepatan pemberantasan buta aksara. Adanya peningkatan jumlah lembaga pendidikan luar sekolah menjadi 147 lembaga tahun 2010. Kesejahteraan guru meningkat dengan pemberian intensif dan kenaikan pangkat bersama 1.072 PNS. Keberhasilan dalam bidang lainya yaitu mendapatkan penghargaan dari pemenang atas keberhasilan dalam pembangunan lembaga pendidikan agama islam.

Dampak bagi pemerintah Adanya penghargaan yang berhasil diperoleh memberikan pengaruh yang positif dan secara tidak langsung menunjukkan pemerintah Gresik berhasil dalam membangun bidang pendidikan. Pemerintah Gresik juga membantu menyukseskan program nasional pemerintahan pusat.

Sedangkan dampak bagi kehidupan masyarakat pada aspek sosial yaitu adanya peningkatan pada persentase melek huruf tahun 2006 berjumlah 48% menjadi 65% pada tahun 2010. Pada bidang ekonomi juga adanya peningkatan dilihat dari peningkatan pada pendapatan perkapita. Respon masyarakat Gresik untuk kebijakan pendidikan juga bersifat positif dilihat dari pemerataan dan layanan pendidikan yang cukup baik dan adanya pembebasan biaya SPP untuk SD pada tahun 2010. Berbagai keberhasilan dalam bidang pendidikan yang diperoleh Kabupaten Gresik tidak pernah lepas dari peran Bupati KH. Robbach Ma'sum dengan dukungan kerjasama dari Dinas Pendidikan dan masyarakat Gresik.

**Kata Kunci:** Kebijakan, KH. Robbach Ma'sum, Kabupaten Gresik

### Abstract

*Gresik Regency prioritizes education in development policies. Education becomes an important thing in life to gain knowledge in development. Progress of development is caused by qualified and educated human resources. In accordance with article 31 of the 1945 Constitution all Indonesian citizens are entitled to education. This is supported by Law no. 23 of 2003 on the national education system that serves to develop the ability and shape the character and the dignity of a dignified nation in order to educate the nation. The problems faced by Gresik Regency before KH. Robbakh Ma'sum has done a lot of development of facilities and infrastructure but the amount of education outside school is still lacking, still low human resources Gresik society, budget allocation less to support education, inappropriate stakeholder acceleration for education management and teacher welfare less get attention.*

*The problems of this research are: 1. Megapa education made a priority scale in policy development during KH Regent. Robbakh Ma'sum? 2. How is the implementation of education policy during the Regent KH. Robbakh Ma'sum? 3. How is the impact of the implementation of education policy in Gresik Regency during the Regent of KH. Robbakh Ma'sum? This study uses historical research methods that include (1) Heuristics, searching for historical sources according to the topic to be researched, (2) Criticism, analyzing the sources for finding historical facts (3) Interpretation, analyzing sources that have been criticized then in interpretation according to the theme of research (4) Historiography, writing the source of reconstructed historical events.*

*The results of this study can be obtained conclusion Various educational problems in Gresik Regency conducted KH. Robbakh Ma'sum education background as an important thing in human life and aimed at improving the human resources of the Gresik community. KH Robbakh Ma'sum as the regent allocated a budget of 30% of the total APBD of Gresik Regency amounting to 480 billion to support the implementation of education policy. Succeeded to get international awards from the Kingdom of Brunei on the bupati's care in education development.*

*While the impact on community life on the social aspect is the increase in the percentage of literacy in 2006 amounted to 48% to 65% in 2010. In the economic field is also an increase seen from the increase in income per capita. Gresik community response to education policy is also positive in terms of equity and good educational services and the exemption of tuition fees for elementary school in 2010. Various successes in education obtained Gresik regency never be separated from the role of Regent KH. Robbakh Ma'sum with the support of cooperation from the Education Office and the Gresik Community.*

**Keywords:** Policy, KH. Robbakh Ma'sum, Gresik Distric

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam pelaksanaan pendidikan tidak pernah lepas dari kekuasaan pemerintahan.<sup>1</sup> Setiap periode perkembangan pendidikan adalah faktor politik dan kekuatan politik karena pada hakikatnya pendidikan adalah cerminan aspirasi, kepentingan, dan tatanan kekuasaan kekuatan politik yang sedang berkuasa.<sup>2</sup>

Persoalan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu dari tuntutan pendidikan, dimana tuntutan SDM ini ternyata mengalami dinamisasi kualitas. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendidikan di Kabupaten Gresik yaitu (1) Masih rendahnya SDM masyarakat Gresik; (2) Pemberian anggaran dana yang kurang untuk menunjang pendidikan; (3) Kurang tepat

dalam penempatan stakeholder untuk pengelolaan pendidikan; dan (4) kesejahteraan guru yang kurang mendapat perhatian.<sup>3</sup> Dalam pembangunan kebijakan pendidikan pada masa Bupati KH. Robbakh Ma'sum bidang pendidikan dijadikan sebagai skala prioritas. Bupati KH. Robbakh Ma'sum berpendapat bahwa melalui pendidikan dapat menghasilkan SDM untuk mewujudkan pembangunan dalam segala bidang. Pembangunan dapat berjalan apabila didukung oleh SDM yang memiliki keahlian dalam bidangnya dan didapatkan melalui pendidikan.

Masa Bupati KH. Robbakh Ma'sum memprioritaskan bidang pendidikan melalui alokasi anggaran dana pendidikan yang cukup besar 30% dari APBD Kabupaten Gresik tahun 2010 dengan jumlah sebesar 450 milyar.<sup>4</sup> Pemberian alokasi anggaran dana yang cukup besar berguna untuk

<sup>1</sup> Ary Gunawan, 1896, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 4

<sup>2</sup> Sirozi, 2011, *Politik Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 185

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bupati Gresik KH. Robbakh Ma'sum Periode 2000-2010

<sup>4</sup> Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

menunjang pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan dengan lancar dan efisien.<sup>5</sup>

Banyak perubahan yang terjadi pada bidang pendidikan di Kabupaten Gresik pada tahun 2000-2010. Pada masa kepemimpinan Bupati Gresik yaitu KH. Robbach Ma'sum untuk penyelenggaraan pendidikan menjadi skala prioritas. Hal tersebut dapat dilihat dari anggaran dasar yang diberikan untuk bidang pendidikan sebesar 30 % dari APBD pada tahun 2010. Pemkot Gresik akan meng-ISO-kan bidang pendidikan sampai Sekolah Dasar. Adanya kenaikan pangkat bersama dengan sejumlah guru di Kabupaten Gresik. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru dengan adanya 1.072 PNS Gresik naik pangkat bersama agar dalam bekerja lebih ditingkatkan kedisiplinan.<sup>6</sup>

Dalam majalah Warta Giri tahun 2004 Kabupaten Gresik menerima penghargaan aksara dalam bidang pembangunan dalam bidang Pendidikan Luar Sekolah, pada tahun 2000 hanya ada 7 unit lembaga pendidikan luar sekolah meningkat menjadi 145 lembaga. Selanjutnya juga. Berdasarkan berita Kompas tanggal 3 Mei 2009 yaitu perkembangan pendidikan di Gresik cukup menggembirakan. Tujuh sekolah telah menerima sertifikasi ISO dan delapan Sekolah masuk Adiwiyata.

Pada penelitian ini sebelumnya belum pernah ada yang meneliti, penelitian terdahulu hanya fokus pada kebijakan pendidikan masa otonomi daerah. Padahal setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dalam melaksanakan kebijakan. Adanya perubahan besar dalam bidang pendidikan, tidak pernah lepas dari peran seorang kepala daerah. Berdasarkan beberapa ulasan tersebut penulis tertarik untuk membuat tulisan berjudul Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Gresik Pada Masa Pemerintahan Bupati KH. Robbach Ma'sum Tahun 2000-2010.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 1. Mengapa kebijakan pendidikan menjadi skala prioritas dalam pembangunan masa Bupati KH. Robbach Ma'sum di Kabupaten Gresik? 2. Bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan pada masa Bupati KH. Robbach Ma'sum di Kabupaten Gresik? 3. Bagaimana dampak

kebijakan pendidikan di Kabupaten Gresik pada masa Bupati KH. Robbach Ma'sum?

## METODE

Metode penelitian sejarah berpedoman pada metodologi penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan Historiografi.

Tahap pertama yang dilakukan penelitian ini yaitu pengumpulan sumber atau biasanya disebut heuristik. Sumber primer pada penulisan ini antara lain data statistik daerah Gresik yang ditulis "Gresik Dalam Angka" mulai dari tahun 2000-2010, yang berisi tentang perkembangan data berupa angka dan presentase perkembangan jumlah gedung sekolah, siswa dan pengajar dalam pendidikan. Sumber utama lainnya meliputi Majalah Warta Giri dari tahun 2000-2010, Selanjutnya juga beberapa Koran seaman seperti Kompas, Surya Online, Jawa Pos yang berisi tentang penghargaan pendidikan yang diberikan kepada Kabupaten Gresik dan wawancara dengan KH. Robbach Ma'sum. Sedangkan sumber sekunder berasal dari buku yang berisi tentang kebijakan pendidikan di Indonesia, biografi KH. Robbach Ma'sum yang berjudul Dari Pesantren ke Pendopo Kabupaten dan berjudul di Bawah Payung Sang Kiai, sebuah refleksi pemikiran politik, agama, pendidikan dan kebudayaan KH. Robbach Ma'sum.

Langkah selanjutnya yaitu kritik yang berupa tahapan yang dilakukan untuk menguji kredibilitas Sumber yang telah ditemukan. Pada tahapan kritik terdiri dari kritik intern dan ekstern. Peneliti menggunakan kritik intern yaitu pada tahap ini peneliti melakukan pengujian terhadap isi kandungan yang terdapat dari sumber-sumber itu sendiri. Setelah melakukan kritik terhadap sumber primer maupun sekunder sudah dianggap sebagai fakta (kebenaran). Penulis juga menggunakan kritik ekstern dengan menganalisis fakta sejarah dari Koran dan hasil wawancara. Untuk mendapatkan fakta sejarah.

Tahap ketiga yaitu interpretasi data atau penafsiran. Penulis mencari hubungan keterkaitan fakta, kemudian ditafsirkan. Fakta yang yang diperoleh disesuaikan dengan bagian perbab. Kemudian penulis melakukan analisis dari penafsirannya berdasarkan pokok permasalahannya.

Tahap keempat yaitu historiografi merupakan tahap terakhir dari teknik penulisan dalam bentuk skripsi yang disusun dalam sistematika.

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bupati Gresik KH. Robbach Ma'sum periode 2000-2010

<sup>6</sup>Warta Giri, 1.072 Gresik Naik Pangkat Bersama, Oktober-November 2004, hlm. 33



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pembagunan Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Gresik

#### 1. Latar Belakang Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Gresik

Indonesia sebagai negara yang besar yang dikarunai kekayaan alam yang berlimpah. Indonesia berpotensi menjadi negara yang maju dan kuat jika mampu mengelola kekayaan alamnya dengan baik. Pengelolaan alam untuk kemajuan bangsa berkaitan dengan manajemen pembagunan. Pembagunan kebijakan pendidikan harus didukung dengan Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidangnya.

Latar belakang kebijakan pendidikan tersebut masa kepemimpinan KH. Robbach Ma'sum meliputi aspek realita bahwa ilmu adalah dasar kehidupan dalam segala macam pembagunan yang ada. Semua pembagunan harus dibekali dengan ilmu. Selanjutnya yaitu aspek agama sangat memerintahkan kita untuk selalu menuntut ilmu, oleh sebab itu pada masa kepemimpinan Drs KH Robbach Ma'sum sangat memprioritaskan pendidikan agama islam dalam pemerintahanya.<sup>7</sup>

Terhadap pembagunan bidang pendidikan masa kepemimpinan Bupati KH. Robbach Ma'sum melakukan langkah pembenahan yang meliputi yaitu perbaikan dan pembagunan fasilitas pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, memberi bantuan terhadap peserta didik. Untuk pendidikan negeri dan swasta diberikan pelayanan yang sama, tidak ada diskriminasi. Untuk mendukung pembagunan bidang pendidikan masa KH. Robbach Ma'sum telah menempuh langkah strategis dengan memperbanyak alokasi anggaran pendidikan dalam APBD.

Target pendidikan di Kabupaten Gresik yaitu membangun SDM yang berkualitas untuk masa depan, menciptakan generasi yang berilmu dan berakhlakul karimah. Karena realitanya banyak generasi yang tidak memperhatikan moral dalam berperilaku oleh sebab itu pendidikan harus dapat menciptakan generasi yang berakhlak.<sup>8</sup>

#### 2. Situasi Pendidikan Di Kabupaten Gresik

Pada tahun 1994-2000 Kabupaten Gresik dipimpin oleh Letkol H. Suwarso. Pemimpin tersebut sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Masa beliau memimpin Kabupaten Gresik telah

mengalami cukup perubahan khususnya dalam bidang pendidikan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya jumlah pada pembagunan sekolah yang didirikan. Untuk data jumlah murid pada jenjang TK tahun 1998 sebanyak 21.363, tahun 1999 berjumlah 22.966 dan meningkat pada tahun 2000 dengan total murid 31.048 siswa. Sedangkan jumlah sekolah tahun 1998 sebanyak 357, tahun 1999 menjadi 381 dan pada tahun 2000 berjumlah tetap yaitu 381 sekolah. Untuk jumlah guru pada jenjang SD/MI tahun 1998 sebanyak 3.779, tahun 1999 meningkat menjadi 7.203 guru dan tahun 2000 jumlahnya relative tetap sama yaitu 7.203 guru.<sup>9</sup>

Sedangkan pada pembagunan pada bidang lembaga pendidikan agama islam juga sudah cukup banyak yaitu pada tahun 1998-2000 jumlahnya sama atau tidak mengalami peningkatan sebanyak 356 untuk MI. Untuk MTs jumlahnya juga relative sama dari tahun 1998-2000 sebanyak 2000 sekolah. Untuk MA juga hanya mengalami sedikit peningkatan dari tahun 1998-2000 berjumlah 50 sekolah. Untuk sekolah Madrasah Diniyah pada tahun 1998-2000 sebanyak 38 buah sekolah. Pembagunan pondok pesantren juga mengalami sedikit perubahan dengan total jumlah pesantren 60 pada tahun 1998-2000.<sup>10</sup>

Melalui wawancara dengan KH. Robbach Masum pada masa sebelum beliau menjabat sebagai Bupati Kabupaten Gresik. Bidang pendidikan tidak ada regulasi khusus yang menangani tentang pendidikan sehingga pada proses implemantasi pendidikan kurang begitu maksimal. Sedangkan aspek pendanaan bagi para stakeholder merasa adanya kekurangan dana pengelolaan untuk pendidikan, hal tersebut disebabkan oleh orangnya yang kurang berkualitas dan aplikasi konsep-konsep pendidikan yang kurang begitu merata. Kebijakan yang dilakukan pertama adalah pemberian anggaran yang cukup besar agar kebijakan dapat berjalan efektif.

#### 3. Peraturan Pendidikan di Kabupaten Gresik

Dalam sistem pendidikan di Kabupaten Gresik berdasarkan UU No. 18 tahun 2006 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gresik yang menjelaskan beberapa hal yaitu membentuk watak budaya masyarakat Gresik yang berbudaya dan bermartabat serta menerapkan nilai-

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bupati Gresik KH. Robbach Ma'sum periode tahun 2000-2010

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bupati Gresik Drs. KH. Robbach Ma'sum periode 2000-2010

<sup>9</sup> Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2000

<sup>10</sup> Warta Giri, Pendidikan Agama, No.37 edisi Mei Tahun 2002

nilai religius guna mewujudkan masyarakat Gresik yang berakhlak mulia, berilmu, dan memiliki kecakapan hidup melalui sinergitas penyelenggaraan pendidikan.

Dalam peraturan daerah memberikan pelayanan terhadap penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Gresik, pemerataan kesempatan pendidikan, terutama bagi anak usia wajib belajar Sembilan tahun dan anak peyandang cacat, peningkatan mutu pembelajaran, tenaga kependidikan serta pengelolaan satuan pendidikan berbasis masyarakat di Kabupaten Gresik, relevansi antara angka transisi, angka partisipasi murni, dan manfaat lulusan terhadap dunia usaha industry dan tranparasi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

Akhirnya mengacu pada visi, misi dan tujuan Kabupaten Gresik serta dalam rangka menjawab tantangan pendidikan nasional, perlu disusun strategi pembagunan dan pengembangan pendidikan dalam bentuk peraturan daerah yang akan dijadikan landasan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gresik. Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai prioritas pembagunan kesejahteraan rakyat salah satunya bidang pendidikan yaitu strategi pembagunan dalam bidang pendidikan yang meliputi meningkatkan anggaran pendidikan, mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan, mengembangkan perpustakaan, meningkatkan subsidi bagi guru-guru swasta, dan menyelenggarakan diklat bagi pelaksana pendidikan.

## **B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GRESIK MASA BUPATI DRS.KH.ROBBACH MA'SUM**

Program untuk kebijakan meliputi kebijakan tentang anggaran untuk pendidikan, program pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, program sarana dan prasarana, program manajemen pendidikan, program pembagunan madrasah, dan program kesejahteraan guru.

### **1. Alokasi Anggaran Pendidikan**

Adanya peningkatan untuk alokasi anggaran dana pendidikan disebabkan oleh any peningkatan pendapatan yang diperoleh Kabupaten Gresik. Pada periode pertama tahun 2000-2005 biaya untuk pendidikan sebesar 1- 21 milyar, mengalami peningkatan pada periode kedua dari tahun 2006-2010 biaya untuk pendidikan sebesar 50-480

milyar. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Gresik untuk pendidikan menjadikan kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien dan merupakan anggaran terbesar dari beberapa daerah dan provinsi lainnya.

Melalui alokasi untuk anggaran pendidikan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, pada tahun 2010 yang mencapai angka 480 milyar. Diharapkan dapat mendukung program pendidikan yang sudah direncanakan dan implementasi kebijakan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Gresik untuk kehidupan yang lebih baik. Sehingga dengan adanya anggaran dana yang cukup besar untuk pendidikan tersebut memberikan dampak yang positif.

### **2. Pemerataan Pendidikan**

Program pemerataan pendidikan adalah dapat diketahui melalui jumlah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni). Pada periode tahun 2009/2010 APK untuk tingkat SD/MI sebesar 104,84% untuk APM nya sebesar 90,36%. Untuk tingkat SMP/MTs jumlah APK sebesar 90,81% dan jumlah APM sebanyak 66,12%. Untuk tingkat SM/MA APK nya sebesar 63,04% dan total APM nya sebesar 44,9%. Berdasarkan data diatas dapat diketahui pada periode pertama tingkat APK nya dengan APM nya terdapat kesenjangan sebesar 19,95%. Sedangkan pada periode kedua tingkat APK dengan APM terdapat kesenjangan sebesar 12,25%. Untuk persentase melek huruf juga mengalami peningkatan. Persentase Angka Melek Huruf Kabupaten Gresik tahun 2006-2009

Tahun	Jumlah
2006	48
2007	45
2008	37
2009	65

(Sumber Data: Dinas Pendidikan Kab Gresik 2010)

Melalui tabel diatas dapat kita dapat melihat bahwa ada peningkatan untuk presentase angka melek huruf pada masyarakat kabupaten Gresik. Dari tahun 2006 sebanyak 48% Sedangkan pada tahun 2009 mengalami peningkatan dengan presentase sebesar 65%. Melalui angka presentase tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Gresik terus berupaya dalam meningkatkan angka melek huruf bagi masyarakat Gresik untuk menuntaskan pemberantasan buta huruf.

### **3. Program peningkatan mutu**

Peningkatan mutu dapat dilihat berbagai indikator yang diukur yaitu persentase lulusan TK/RA/BA, angka mengulang, angka putus sekolah, angka lulusan, biaya dan satuan biaya sekolah.

Pada awal periode tahun 2000-2005 pada masa kepemimpinan KH. Robbakh Ma'sum cukup mengalami peningkatan. Khusus SMP dan SMA ditambah dengan indikator kesesuaian Guru mengajar menurut bidang studi. Siswa baru SMP adalah sebesar 82,16%. Angka mengulang yang terbesar terdapat pada jenjang SD yaitu 2, 64%, sedangkan angka putus sekolah yang terbesar terdapat pada tingkat MI yaitu sebesar 0,29%, dan untuk angka kelulusan terbesar terdapat pada tingkat SD dan MI yaitu sebesar 100%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SD dan MI perlu ditangani lebih lanjut karena memiliki nilai yang negatif yang berarti mutu pendidikannya kurang.

Periode kedua Khusus SMP dan SMA ditambah dengan indikator kesesuaian Guru mengajar menurut bidang studi. Siswa baru SD dan MI yang berasal dari TK/RA/BA adalah sebesar 94,30%. Angka mengulang yang terbesar terdapat pada jenjang SD yaitu 1,60%, sedangkan angka putus sekolah yang terbesar terdapat pada tingkat SMK yaitu sebesar 0,62%, dan untuk angka kelulusan terbesar terdapat pada tingkat SMK yaitu sebesar 98,45%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SD dan MI perlu ditangani lebih lanjut karena memiliki nilai yang negatif yang berarti mutu pendidikannya kurang.

Pada kenyataan, angka partisipasi dari segi biaya lebih banyak terdapat berasal dari pemerintah daerah pada tingkat SD. Jika dibandingkan dengan orangtua/walimurud atau pemerintahan pusat. Pada tingkat SMP partisipasi terbesar berasal dari pemerintahan pusat sedangkan untuk tingkat SM, partisipasinya terbesar terdapat pada orang tua.

#### **4. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pendidikan**

Pada masa pemerintahan KH. Robbakh Ma'sum dapat dipastikan bahwa pembangunan dibidang pendidikan berjalan cukup pesat, terutama untuk pembangunan dalam bidang infrastruktur pendidikan baik dalam bentuk rehabilitasi, pengadaan, ataupun penambahan. Jumlah lembaga sekolah dasar tahun 2009 ialah 440 buah. Jumlah lembaga sekolah menengah yaitu 95 buah untuk SMP dan 48 untuk SMA. Untuk SMK jumlah

lembaga sekolah sebanyak 34 buah dengan jumlah murid 12.531 siswa.<sup>11</sup>

Perkembangan pembangunan lembaga untuk PLS juga cukup mengalami perkembangan pesat dari awalnya berjumlah 7 sampai 147 buah untuk mendukung keberhasilan dari program PLS di Kabupaten Gresik.

Pada tahun 2008, Salah satu program untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu Rumah Baca. Rumah baca adalah sebuah program untuk mendorong program minat baca masyarakat, keberadaanya sangat penting dan strategis. Pemerintah Kabupaten Gresik mengadakan Pesta buku murah di gelar di gedung nasional Indonesia. Gresik yang berlangsung mulai tanggal 10 sampai 16 november 2008. Adanya penawaran diskon mulai 25% sampai 90%.<sup>12</sup> Penyelenggaraan pesta buku murah juga mendapat tanggapan yang cukup besar dari masyarakat yaitu adanya jumlah pengunjung yang setiap harinya sekitar 500 orang pengunjung. Pembangunan lembaga PAUD juga sudah dilakukan.

#### **5. Program Manajemen sekolah**

Manajemen berbasis sekolah adalah pengelolaan yang bertitik tolak pada kebutuhan dan harapan dari sekolah itu sendiri. Implementasinya pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan di lapangan dan dilakukan perbaikan. Melalui MBS, diharapkan sekolah dapat melakukan pengelolaan manajemen dengan mudah dan efektif dalam pelaksanaan.

Khusus untuk peningkatan manajemen pendidikan, pendidikan Kabupaten Gresik menjalin kerjasama dengan dengan program Indonesia Australia Partership in Basic Education (IAPBE). Untuk meningkatkan mutu pembelajaran dinas pendidikan melakukan pelatihan PAKEM, MBS dan PSM sesuai standar IAPBE.<sup>13</sup>

Sebanyak 508 orang kepala sekolah SMP dan SMA sekabupaten Gresik mengikuti sosialisasi Internasional Organization for Standarisation (ISO) untk menejemen mutu.<sup>14</sup> jumlah peserta sosialisasi ISO sebanyak 508 orang. Jumlah ini terdiri dari KEPALA SEKOLAH, SMP, MTs, SMA, MA, SMK baik negeri maupun swasta. Selain para

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2011

<sup>12</sup>Warta Giri, *Jadikan Membaca Kebutuhan Hidup Sehari-Hari*, No. 75 Edisi V Tahun 2008, hlm. 36

<sup>13</sup> Warta Giri, *Berorientasi Pada Peningkatan Mutu Pendidikan*, No. 58 edisi November-Desember 2005

<sup>14</sup>Warta Giri, *Tahun 2009, Seluruh SD di Gresik Wajib Memiliki ISO*, Edisi Maret 2004, hlm.36



kepala sekolah, para pejabat dan staf Pdan K sebanyak 147 orang. Serta seluruh kepala cabang dinas P dan K Kabupaten Gresik.<sup>15</sup> Salah satu yang bersertifikat ISO yaitu SMK Cerme.

#### 6. Program Peningkatan Kesejahteraan Guru

Realisasi dari upaya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan guru, pada masa pemerintahan KH. Robbakh Ma'sum. Kebijakan tersebut terealisasi melalui berbagai bentuk yaitu bantuan insentif guru meliputi guru TK/SD/MI/SLTP/SMU/MTs/SMK/MA, TPQ, dan Ponpes. Data pada anggaran tahun 2002 jumlahnya kurang lebih Rp 240.000, dengan jumlah guru kurang lebih 12.690 orang. Sehingga total biaya insentif guru sekitar Rp 3.045.600.000.

Sebanyak 266 karyawan kabupaten Gresik dalam kurun waktu 1 tahun mereka masih menerima gaji sebesar 80% namun sejak Bupati Gresik menyerahkan SK PNS, apa yang mereka harapkan terwujud yaitu adanya penerimaan gaji yang penuh yaitu 100%.<sup>16</sup>

Mulai tanggal 1 April 2004 sebanyak 1.072 PNS dan Guru golongan I, II, III di Kabupaten Gresik untuk kenaikan pangkat secara bersama-sama. Kenaikan pangkat kebanyakan adalah para pejabat fungsional yaitu para guru. Turunya gaji ke 13 di yang diberikan untuk PNS, guru dan pegawai honorer di lingkungan Pemkab Gresik.<sup>17</sup>

#### 7. Kebijakan Pembangunan Madrasah di Kabupaten Gresik

Pembangunan lembaga pendidikan agama mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 jumlah lembaga pendidikan islam berjumlah 314, mengalami peningkatan yang besar pada tahun 2010 dengan jumlah seluruhnya 933 lembaga pendidikan agama. Yang terdiri dari jumlah RA sebanyak 172, MI Negeri sebanyak 2 lembaga, MI swasta sebanyak 360 lembaga, MTs Negeri sebanyak 1 lembaga, MTs Swasta sebanyak 132 lembaga, untuk MAN sebanyak 2, Lembaga Mas sebanyak 61, lembaga diniyah sebanyak 40 dan PONPES sebanyak 163 lembaga.

Untuk penyelenggaraan UN Pendidikan Agama di Kabupaten Gresik merupakan salah satu dari lima daerah di Indonesia yang

menyelenggarakan UN agama pertama.<sup>18</sup> Pembangunan lembaga pendidikan islam memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Gresik yang agamis dan sesuai slogan Kabupaten Gresik yaitu Gresik berhias Iman.

#### C. Dampak Dari Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Gresik

##### 1. Dampak Bagi Pendidikan

Adanya implementasi kebijakan pendidikan memberikan dampak yang besar pada perkembangan pendidikan di Kabupaten Gresik, hal itu dapat dilihat dari berbagai peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun peningkatan kesejahteraan guru dan juga peningkatan pelayanan pendidikan. Berikut berbagai peningkatan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Gresik:

##### a. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana

Setiap tahun yang mengalami peningkatan pada tahun 2010 untuk sekolah dasar berjumlah 800 untuk SMP dan SMA 94 sekolah. Pembangunan luar sekolah yang awal tahun 2000 berjumlah 7 lembaga meningkat menjadi 145 lembaga. Pembangunan selain pada sekolah juga diluar sekolah seperti pembangunan untuk perpustakaan seperti Rumah baca, pembangunan PAUD, Pembangunan juga dilakukan dalam bidang agama yaitu pembangunan madrasah dari tingkat MI, MTs dan MA, juga pondok pesantren. Pembangunan lembaga pendidikan agama memiliki tujuan untuk menciptakan manusia yang memiliki akhlakul karimah.

##### b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan sumber daya manusia kabupaten Gresik dapat dilihat dari presentasi melek huruf yang setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2006 sejumlah 48% pada tahun 2010 berjumlah 65%. Dengan adanya kenaikan presentase melek huruf secara tidak langsung juga mempengaruhi pada peningkatan kualitas SDM masyarakat Gresik. Peningkatan sumber daya manusia juga dapat dilihat dari berbagai prestasi yang diraih oleh Kabupaten Gresik dalam pembangunan kebijakan pendidikan yaitu keberhasilan dalam menuntaskan buta huruf pada tahun 2009. Hal itu memiliki dampak bagi perkembangan pendidikan selanjutnya dalam

<sup>15</sup>Ibid, hlm. 36

<sup>16</sup> Warta Giri, *Bupati Mengajak Bekerja Sesuai Aturan Yang Benar*, No. 61 Edisi Mei-Juni 2006

<sup>17</sup>Warta Giri, *1.072 Gresik Naik Pangkat Bersama*, Oktober-November 2004, hlm.33

<sup>18</sup> Kompas, 2009, *Gresik Penyelenggara UN Pendidikan Agama*

meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan.

### c. Peningkatan Kesejahteraan Bagi Tenaga Pendidikan

Peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidikan khususnya guru juga mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat melalui program yang diberikan untuk guru berupa pemberian intensif dan tunjangan hari raya, baik guru swasta maupun guru yang berstatus PNS. Kesejahteraan guru dengan mendapatkan intensif kurang lebih sebesar Rp 240.000 rupiah. Adanya peningkatan kesejahteraan yang diberikan kepada guru, memiliki dampak bagi pendidikan selanjutnya guru juga harus bisa meningkatkan kualitas SDM peserta didik dalam pendidikannya.

### d. Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peningkatan pelayanan dibuktikan dengan adanya sebagian hasil dari tingkat pelayanan pendidikan yang cukup tinggi. Untuk tingkat pelayanan pada sekolah PAUD mencapai angka 75,5%, penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun melek huruf sebesar 65%, untuk besarnya angka partisipasi murni SD/MI/paket A sebanyak 92,7%, untuk tingkat SMP/ MTs sebanyak 66,06% dan tingkat SMA/SMK/MA/Paket C sebanyak 49,7%. Sedangkan angka putus sekolah pada tingkat SD sebesar 0,07%, untuk tingkat SMP/MTs sebesar 0,25% dan tingkat SMA/SMK/MA 0,46%. Semakin tinggi jenjang sekolah semakin tinggi juga angka putus sekolahnya, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor adanya ketidakmampuan ekonomi, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Hal tersebut mempengaruhi pada perkembangan pendidikan selanjutnya yang lebih baik, dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Gresik dan meningkatkan pemerataan untuk akses pendidikan di Kabupaten Gresik.

## 2. Dampak Bagi Pemerintah

Selama kepemimpinan Bupati KH. Robbach Ma'sum, memiliki beberapa dampak dalam bidang pendidikan di Kabupaten Gresik. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa bentuk penghargaan yang diperoleh dalam bidang pendidikan masa Bupati KH. Robbach Ma'sum dalam skala nasional maupun internasional yang diterima yaitu keberhasilan dalam menuntaskan buta aksara tingkat dasar tahun 2004 dan tingkat dasar pada tahun 2009. Penghargaan Adanya penghargaan yang diperoleh pemerintahan Gresik pada

bidang pembangunan lembaga pendidikan islam. Hal tersebut memberikan pengaruh yang positif dan secara tidak langsung menunjukkan keberhasilan dari pemerintah Gresik dalam membangun bidang pendidikan, dan membantu mensukseskan program nasional pemerintahan pusat.

## 2. Dampak Bagi Masyarakat Kabupaten Gresik

Dampak dari implementasi kebijakan pendidikan dapat dilihat dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Dampak pada bidang sosial yaitu dilihat melalui peningkatan angka presentase melek huruf masyarakat Gresik yang mengalami peningkatan pada tahun 2006 sebanyak 48 persen, dan pada tahun 65 persen pada tahun 2010. Aspek sosial dapat dilihat sebelumnya pendidikan belum menjangkau semua masyarakat Gresik, dan masa bupati KH. Robbach Ma'sum berusaha untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Pembangunan poros desa yang digunakan untuk mempermudah akses pendidikan bagi daerah yang terpencil, sehingga masyarakat pada daerah terpencil bisa mendapatkan pendidikan.<sup>19</sup>

Dampak untuk bidang ekonomi pada tahun 2010 jumlah pencari kerja lulusan sarjana sebanyak 64,71%, lulusan SMK sebanyak 17,63%, lulusan SMU sebanyak 14,70%, tamat SLTP sebanyak 0,17%.<sup>20</sup> Dapat kita ketahui banyak masyarakat Gresik yang banyak memperoleh pendidikan, dilihat dari jumlah pencari kerja yang sudah lulus sarjana. Tetapi lulusan sarjana tidak diimbangi dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Sedangkan pada pendapatan perkapita yang didapatkan oleh masyarakat Gresik setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun 2005 pendapatan perkapita atas dasar harga yang berlaku sebesar 13.858.894 rupiah, dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 22.407.580 rupiah. Adanya kenaikan pendapatan perkapita tersebut menunjukkan kenaikan status ekonomi masyarakat pula. Dengan adanya kondisi tersebut, menyebabkan perekonomian daerah Kabupaten Gresik memang mengalami pergerakan positif hingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduknya.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bupati Gresik KH. Robbach Ma'sum periode 2000-2010

<sup>20</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2011



**b. Respon Masyarakat Kabupaten Gresik Terhadap Kebijakan Pendidikan.**

Untuk mengetahui respon masyarakat Gresik mengenai Kebijakan Pendidikan, penelitian dilakukan melalui angket yang diisi oleh masyarakat Gresik. Berdasarkan hasil angket yang diisi oleh beberapa masyarakat Gresik mengenai pembangunan kebijakan pendidikan di Kabupaten Gresik pada masa Bupati KH. Robbach Ma'sum tahun 2000-2010.

Berdasarkan hasil angket tersebut sebagian besar masyarakat Gresik sangat mendukung kebijakan pendidikan pada masa Bupati KH. Robbach Ma'sum karena pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam pembangunan kebijakan juga cukup sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, tujuan pendidikan juga dapat tercapai dan membantu dalam pemerataan untuk akses pendidikan. Pelaksanaan pelayanan pendidikan juga cukup bagus, yang pada dasarnya pelaksanaan kebijakan pendidikan lebih bagus daripada pemerintahan sebelumnya. Masa pemerintahan KH. Robbach Ma'sum yang diingat oleh masyarakat adalah adanya pembebasan biaya pendidikan untuk SPP.

**PENUTUP**

**a. Kesimpulan**

Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memprioritaskan pembangunan kebijakan pada aspek pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan dijadikan skala prioritas juga karena adanya aspek realita ilmu adalah segala dasar kehidupan pembangunan dalam segala bidang. Agama juga memerintahkan untuk menuntut ilmu sebagai bekal kehidupan. Hal itu juga didukung dalam pasal 31 UUD'45 yang menyatakan bahwa setiap warga negara pendidikan harus mendapatkan pendidikan.

Pembangunan kebijakan pendidikan menjadi skala prioritas di Kabupaten Gresik dapat dilihat dari alokasi anggaran yang diberikan cukup besar yaitu 30% dari APBD Kabupaten Gresik dengan jumlah 450 Milyar, padahal dalam peraturan pusat anggaran wajib daerah untuk pendidikan hanya 20% APBD Kabupaten maupun Provinsi. Anggaran yang diberikan Kabupaten Gresik terbesar dari berbagai daerah lainnya, bahkan mengalahkan anggaran yang diberikan dari pusat dan

provinsi. Pembangunan kebijakan pendidikan selalu dipengaruhi oleh pemerintah yang sedang berkuasa.

Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Gresik membuat kebijakan dengan berbagai macam program pendidikan yang menekankan pada alokasi anggaran pendidikan, program pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, program manajemen sekolah, program peningkatan kesejahteraan guru, program pembangunan madrasah, pembangunan sarana dan prasarana dan pelayanan urusan pendidikan. Dalam menunjang agar masyarakat gemar membaca maka diadakan program pesta buku terbesar se Jawa Timur dan pembangunan rumah baca.

Dalam implementasi berbagai kebijakan pendidikan di Kabupaten Gresik memiliki dampak bagi pendidikan yaitu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari persentase angka melek huruf tahun 2006 sebesar 48% mengalami peningkatan tahun 2010 berjumlah 65%. Adanya peningkatan bagi kesejahteraan guru melalui pemberian intensif dan tunjangan hari raya. Mutu pendidikan juga mengalami peningkatan dilihat dari keberhasilan dalam meng-ISO kan beberapa sekolah salah satunya SMK Cerme. Anggaran untuk pendidikan juga mengalami peningkatan tahun 2000 berjumlah 7,20% dari APBD meningkat pada tahun 2010 berjumlah 30% APBD. Untuk dampak bagi pemerintah adalah keberhasilan menerima penghargaan dalam menuntaskan buta aksara tingkat dasar tahun 2004 dan tingkat lanjut tahun 2009. Adanya penghargaan yang berhasil diperoleh memberikan pengaruh yang positif dan secara tidak langsung menunjukkan pemerintah Gresik dalam berhasil dalam membangun bidang pendidikan. Pemerintah Gresik juga membantu menyelesaikan program nasional pemerintahan pusat.

Sedangkan dampak bagi kehidupan masyarakat pada aspek sosial yaitu adanya peningkatan pada persentase melek huruf tahun 2006 berjumlah 48% menjadi 65% pada tahun 2010. Pada bidang ekonomi juga adanya peningkatan dilihat dari peningkatan pada pendapatan perkapita. Respon masyarakat Gresik untuk kebijakan pendidikan juga bersifat positif dilihat dari pemerataan dan layanan pendidikan yang cukup baik dan

adanya pembebasan biaya SPP untuk SD pada tahun 2010. Berbagai keberhasilan dalam bidang pendidikan yang diperoleh Kabupaten Gresik tidak pernah lepas dari peran Bupati KH. Robbach Ma'sum dengan dukungan kerjasama dari Dinas Pendidikan dan masyarakat Gresik.

#### A. Saran

Pada masa pemerintahan Bupati KH. Robbach Ma'sum pembangunan kebijakan khususnya pendidikan di Kabupaten Gresik berjalan cukup baik dan berhasil meraih berbagai penghargaan. Bagi pemerintahan selanjutnya diharapkan bisa meneruskan program pendidikan tersebut dan dapat membangun Kabupaten Gresik lebih baik lagi.

Diharapkan dengan adanya berbagai keberhasilan kebijakan pendidikan pada masa Bupati KH. Robbach Ma'sum. Ada beberapa kebijakan yang perlu dikembangkan salah satunya yaitu untuk kebijakan Pembangunan lembaga PAUD bisa dikembangkan lebih lanjut.

Penulis menyadari masih terdapat banyak sekali kelemahan dalam karya tulis ini, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik yang membangun. Semoga karya ini dapat menjadi referensi bagi penulis-penulis selanjutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA:

##### Arsip:

Gresik Dalam Angka Tahun 2000-2010  
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.  
Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2011-2015  
Pemerintahan Kabupaten Gresik. Profil Investasi Kabupaten Gresik tahun 2002

##### Koran-koran:

Majalah Warta Giri tahun 2000-2010  
Kompas, 2 Mei 2008. Siswa dan Guru Berprestasi di Gresik Dapat Penghargaan.  
Kompas, 3 Mei 2009. Tujuh Sekolah Terima ISO Delapan Masuk Adiwiyata.

Republika News, Selasa, 27 Oktober 2009. Gresik Menerima Penghargaan Bebas Buta Aksara  
Surya, Selasa 20 Oktober 2009. Gresik Masuk 15 Besar Profesionalisme Award

Kementrian Agama RI, 3 Januari 2009. Enam Bupati/Walikota Dapat Penghargaan Peduli Pendidikan Islam

##### Buku :

Aminudin Kasdi, 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.  
Ance S Tilaar, 1994. *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.  
Ary Gunawan, 1986. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara  
Hasbullah, 2015. *Kebijakan Pendidikan: Dalam Prespektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.  
Agustinus Leo, 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta  
Muhammad Zainuddin, 2015. *Reformasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Kementrian Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: Universitas Negeri Malang  
Munadi Barnawi, 2011. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media  
Nanang Fattyah. 2013. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya  
Nurul Huda, 2005. *Di Bawah Payung Sang Kyai: Sebuah Refleksi Pemikiran Politik, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan KH. Robbach Ma'sum*. Gresik: Ihyaul Ulum Publisier  
Sam Tuti. 2005. *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sirozi, 2011. *Politik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Subali, 2004. *Biografi KH.Robbach Ma'sum Dari Pondok Pesantren ke Pendopo Gresik*. Gresik: Ihyaul Ulum Publisier
- Sukardi, 2003. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Joko Widodo, 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia
- Dunn William, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

**Jurnal:**

- Aminuddin Bakry. 2010. *Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Jurnal MEDTEK, Vol. 2 No. 1
- Arum Sriwidi Astutik. 2017. *Perkembangan Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Lamongan Pada Masa Pemerintahan Bupati H.Masfuk Tahun 2000-2010*". AVATARA Vol. 5 No. 1

- Lambelanova, Rossy. 2017 *"Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Kesehatan Perekonomian Di Kabupaten Bandung Barat"*. Sosiohumaniora, Vol. 19 N0. 2
- Muhammad Zuhdi, 2012. *Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Pertemuan Nasional Jaringan Demokrasi Antar Kampus: Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia.
- Ravik & Karsidi, 2005. *Profesionalisme Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Seminar Nasional Pendidikan: Dewan Pendidikan Kabupaten Wonogiri.

**Internet:**

- <http://gresikkab.go.id/profil/penghargaan> diakses tanggal 23 Januari 2018 pukul 10.54
- [http://gresikkab.go.id/profil/gresik dalam angka](http://gresikkab.go.id/profil/gresik_dalam_angka) diakses tanggal 23 Januari 2018 pukul 10.53

